



Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik

Elizamiharti^{1*}, Nelfira²

Program Studi Sistem Informasi, Universitas Metamedia, Indonesia | elizamiharti2@gmail.com¹

Program Studi Sistem Informasi, Universitas Metamedia, Indonesia | nelfira@stmikindonesia.ac.id²

Correspondence Author*

Abstract

This article discusses the impact of digital technology, particularly the internet and social media, on political participation in Indonesia. The digital era has brought significant changes in how people interact with government and politics. The development of digital technology enables more inclusive political participation and strengthens the voices of citizens from diverse backgrounds. Citizens can easily communicate and share their views on political issues through social media platforms. Additionally, political participation through digital technology enhances transparency and accountability in governance. Citizens can monitor the actions of political leaders and provide direct feedback via social media. This research employs a descriptive study with a qualitative approach. Data collection techniques in this research involve studying literature from various relevant and contemporary sources. The article emphasizes the crucial role of social media as a platform for political participation in the digital era but also urges for the wise use of social media to avoid opinion polarization and the formation of "filter bubbles." Political participation in the digital era has both positive impacts and challenges that need to be addressed wisely. Digital and critical literacy awareness is key to maintaining inclusive and healthy political participation in the evolving digital era.

Keywords: *Democracy, Digital Era, Political participation, Social media, Digital literacy.*

Abstrak

Artikel ini membahas dampak perkembangan teknologi digital, khususnya internet dan media sosial, terhadap partisipasi politik di Indonesia. Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintahan dan politik. Perkembangan teknologi digital memungkinkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan memperkuat suara warga dari berbagai latar belakang. Warga negara dapat dengan mudah berkomunikasi dan berbagi pandangan mengenai isu-isu politik melalui platform media sosial. Selain itu, partisipasi politik melalui teknologi digital juga meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam pemerintahan. Warga dapat memantau tindakan pemimpin politik dan memberikan umpan balik langsung melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur dari berbagai sumber yang relevan dan kontemporer. Artikel ini menekankan peran penting media sosial sebagai platform partisipasi politik di era digital, namun juga mengimbau untuk menggunakan media sosial dengan bijaksana guna menghindari polarisasi opini dan pembentukan "filter bubble". Partisipasi politik di era digital memiliki dampak positif dan tantangan yang harus diatasi dengan bijaksana. Kesadaran literasi digital dan kritis menjadi kunci untuk menjaga partisipasi politik yang inklusif dan sehat di era digital yang terus berkembang.

Kata kunci: Demokrasi, Era Digital, Partisipasi politik, Media sosial, Literasi digital

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, telah menghasilkan akses informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkembangan internet di Indonesia telah mengalami peningkatan yang dapat berdampak secara positif maupun negatif terhadap pemerintahan dan politik di negara ini. Era digital telah mengubah lanskap politik dengan cara yang sangat jauh berbeda dengan beberapa dekade lalu. Di era digital yang terus berkembang pesat, teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks demokrasi dan partisipasi politik. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat dalam satu dasa warsa pertama di abad 21, jumlah orang yang terhubung ke Internet di seantero dunia melesat dari 350 juta jiwa menjadi lebih dari 2 miliar jiwa. Sementara itu, jumlah pengguna telepon seluler meningkat pesat dari 750 juta menjadi lebih dari 5 miliar jiwa (kini mencapai lebih dari 6 miliar pengguna) (Schmidt & Cohen, 2014).

Munculnya teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan mempengaruhi dinamika politik yang ada. Perkembangan teknologi digital membuka ruang baru yang mengizinkan partisipasi politik secara lebih inklusif dan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Pemanfaatan internet menjadi aspek krusial dalam perkembangan teknologi, dan tingkat penggunaan internet di berbagai wilayah Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Menurut data yang disampaikan oleh sekretaris Jenderal APJII Henri Kasyfi Soemartono, yang dikutip dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa penggunaan internet naik dari 64,8% tahun 2018 menjadi 73,7% tahun 2019 (Kominfo, 2019). Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penetrasi masyarakat Indonesia terhadap internet dan teknologi mencapai 196,7 juta jiwa artinya sebanyak 73,7% populasi di Indonesia sudah melek teknologi. Berdasarkan laporan (Kemp, 2021), terjadi peningkatan intensitas jumlah pengguna internet dan media sosial yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2020 dan 2021.. Berdasarkan laporan yang sama, sampai pada Januari 2021, tercatat jumlah pengguna internet mencapai 202,6 juta pengguna, di mana terjadi kenaikan sebanyak 16% (27

juta pengguna) dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan data statistik pengguna Internet di Indonesia, rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan waktu mengakses informasi selama 5,5 jam per-hari. Sementara itu, rata-rata penggunaan internet melalui smartphone atau telepon genggam mencapai sekitar 2,5 jam per hari (Santosa, 2015).

Munculnya platform media sosial, aplikasi berbagi informasi, dan alat-alat digital lainnya telah memberikan warga akses yang lebih besar terhadap informasi politik dan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam era digital yang terus berkembang, masyarakat sekarang dapat dengan mudah mengakses berita, laporan, dan pandangan politik dari berbagai sumber yang tersebar di platform digital. Informasi politik yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui media tradisional, kini dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui platform online. Selain itu, masyarakat juga dapat dengan mudah berpartisipasi dalam diskusi online, menandatangani petisi digital, dan berkontribusi dalam kampanye politik melalui platform digital.

Media sosial digadang-gadang sebagai pilar kelima dalam demokrasi. Trias politika yang dikenal sebagai pilar demokrasi adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam perkembangannya, peran media massa sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan demokrasi semakin diakui dan dianggap sebagai pilar keempat dalam sistem demokras. Media massa pun dinilai sebagai institusi yang seharusnya terlepas dari sumber kekuasaan (Gelgel, 2019). Media sosial memungkinkan warga untuk berbagi pendapat, memobilisasi dukungan, dan menyampaikan aspirasi politik mereka kepada pemimpin politik dan institusi yang berwenang. Melalui alat-alat digital ini, partisipasi politik menjadi lebih inklusif, memungkinkan warga dari berbagai latar belakang untuk memiliki suara dan mempengaruhi keputusan publik. Kehadiran platform media sosial dan aplikasi berbagi informasi juga telah mengubah dinamika kampanye politik. Calon politikus dan partai politik dapat menggunakan platform digital untuk membangun basis dukungan, menyampaikan pesan politik, dan mendapatkan umpan balik dari warga. Kampanye politik yang sebelumnya terbatas pada media tradisional, kini dapat mencapai audiens yang lebih luas dan memanfaatkan daya viralitas yang dimiliki oleh media sosial. Media sosial dan platform digital lainnya memberikan warga kesempatan untuk menyampaikan suara mereka secara publik, mengorganisir gerakan politik, dan mempengaruhi perubahan sosial.

Namun, bersamaan dengan peluang yang ada, era digital juga menimbulkan tantangan yang serius terhadap demokrasi. Dengan adanya akses yang lebih besar terhadap informasi politik dan partisipasi politik melalui platform digital, tantangan seperti disinformasi atau penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan politik warga menjadi semakin meresahkan. Penyebaran disinformasi ini dapat membingungkan masyarakat, memperkuat polarisasi, dan mempengaruhi integritas diskusi politik yang kritis dan sehat. Selain itu, manipulasi elektoral juga menjadi ancaman serius, di mana pelaku politik atau pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan teknik manipulasi, seperti serangan siber atau pengaruh terhadap algoritma media sosial, untuk mempengaruhi opini publik atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam pemilihan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah pelanggaran privasi dan keamanan cyber. Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan kekhawatiran akan privasi data pengguna dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Ada risiko yang muncul terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi yang dapat digunakan untuk memengaruhi proses

politik atau mengancam integritas partisipasi warga. Pelanggaran privasi dan serangan siber yang terjadi dalam konteks politik dapat merusak kepercayaan publik dan mempengaruhi keabsahan proses politik.

Dengan memahami latar belakang yang mendalam mengenai demokrasi di era digital, kita dapat memahami tantangan dan peluang yang terkait dengan partisipasi politik di era digital. Melalui pemahaman ini, dapat dikembangkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk memastikan partisipasi politik yang inklusif, transparan, dan aman di era digital yang terus berkembang. Dalam artikel ini, penulis akan mengeksplorasi dampak positif partisipasi politik di era digital, di sisi lain penulis juga akan membahas tantangan yang dihadapi. Dengan menganalisis tantangan dan peluang dalam partisipasi politik di era digital, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang perubahan sosial dan politik yang sedang terjadi. Selain itu, artikel ini juga diharapkan dapat menghasilkan pemikiran dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk menjaga dan memperkuat demokrasi di era digital yang kompleks ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan akurat tentang suatu masalah penelitian. Moleong (2010) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan lingkungan alam untuk menginterpretasikan peristiwa yang terjadi dan dihasilkan oleh partisipasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih detail untuk menggambarkan peristiwa (Sugiyono, 2018). Metode deskriptif juga digunakan untuk mengkaji data sesuai dengan apa adanya (Irawan, 2007).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur dari berbagai sumber yang relevan dan kontemporer. Dialektika dibangun dengan cara melakukan review dan menganalisisnya secara kritis atas berbagai sumber literatur yang dipilih. Studi literatur diperoleh dari sumber terbuka seperti buku-buku, internet, jurnal, dan berbagai sumber lainnya. Pencarian literatur difokuskan pada karya yang dipublikasikan hingga tahun 2023. Dari hasil pencarian yang dilakukan, data kemudian direduksi dan dipilih yang sejalan dengan topik penelitian sebagai referensi dalam penulisan artikel ini, terutama yang berkaitan dengan demokrasi di era digital.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran teknologi digital dalam partisipasi politik dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pembahasan tentang demokrasi di era digital, serta memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan yang relevan dalam mempromosikan partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan di era digital yang terus berkembang.

Kajian Teori

Demokrasi Era Digital

Demokrasi memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, walaupun pelaksanaannya dapat berbeda antara negara-negara. Menurut Tutik (2010) demokrasi berasal dari bahasa Yunani "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "*cretein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Ini mencerminkan keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh warga dewasa. Dalam konsep partisipatif, demokrasi dianggap sebagai kekuasaan yang berasal dari, oleh, untuk, dan bersama-sama dengan rakyat. Dengan demikian, kekuasaan sesungguhnya berasal dari rakyat, dan mereka yang menentukan dan mengelola kehidupan negara.

Gagasan politik tentang demokrasi mengandung 5 (lima) kriteria penting, termasuk persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; partisipasi efektif, yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan bersama; pembeberan kebenaran, yang memberikan peluang yang sama bagi semua orang untuk menilai jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; kontrol terakhir terhadap agenda, yang memberi warga eksklusif dalam menentukan agenda melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan kepada pihak lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan pencakupan, yang mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum (Dahl, 1985).

Demokrasi digital, menurut Hacker & Dijk (2000), adalah serangkaian upaya untuk menerapkan demokrasi tanpa batasan ruang, waktu, atau kondisi fisik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta CMC (*Computer-mediated Communication*). Demokrasi digital menggabungkan demokrasi partisipatif dan demokrasi perwakilan, mentransferkan kekuasaan rakyat ke dalam ICT (Castells, 1997). Perkembangan pesat interaksi antara dunia maya dan kebijakan sosial menjadi fokus dalam pemahaman demokrasi digital (Alexander & Pal, 1998). Secara teoretis dan praktis, demokrasi digital menjelaskan dampak ICT pada demokrasi dan proses politik. ICT berperan penting dalam memperkuat demokrasi berbasis jaringan komunitas. Para ahli meyakini bahwa ICT memiliki potensi untuk mendorong perkembangan demokrasi dan menciptakan lompatan kualitatif dalam konteks demokrasi politik (Becker, 1998). Demokrasi digital memungkinkan terbentuknya jaringan global tanpa batas wilayah, menciptakan kebebasan berpendapat tanpa sensor dari pemerintah atau negara, dan mendorong identitas nasional yang mencakup identitas lokal dan global (Hague & Loader, 1999).

Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang melibatkan keterlibatan dan kontribusi aktif dari warga negara dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam pandangan etimologi, istilah "partisipasi" mencakup berbagai makna seperti kesertaan, keikutsertaan, keterlibatan, peran serta, kerja sama, dan kooperasi (Eko Endarmoko, 2006). Lebih lanjut, "berpartisipasi" menunjukkan tindakan berperan serta, ikut serta, menyerikati, terlibat, dan terjun dalam kegiatan yang terkait dengan kehidupan politik (Eko Endarmoko, 2006). Asumsi yang menjadi dasar dari konsep demokrasi dan partisipasi adalah keyakinan bahwa individu adalah yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri (Berger, 1976). Dalam pandangan ini, partisipasi menjadi mekanisme untuk memberikan kesempatan pada warga negara untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Samuel P. Huntington & Nelson (1994) mendefinisikan partisipasi politik sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, serta dapat berlangsung secara damai atau melibatkan kekerasan, dan memiliki tingkat efektivitas yang bervariasi. Dalam pandangan Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari (Surbakti, 1992).

Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif (Sudijono Sastroatmodjo, 1995). Partisipasi individual melibatkan tindakan-tindakan individu seperti menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sementara itu, partisipasi kolektif terjadi ketika sekelompok warga negara berpartisipasi secara serentak dengan tujuan mempengaruhi penguasa, misalnya melalui kegiatan pemilu (Sudijono Sastroatmodjo, 1995). Namun, Maribath dan Goel (dalam Rahman, 2007) melakukan pembagian kategori partisipasi politik yang lebih rinci:

- a. Apatis, yaitu individu yang cenderung tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, yaitu individu yang setidaknya pernah ikut serta dalam pemilu sebagai bentuk minimal partisipasi politik.
- c. Gladiator, yaitu individu yang aktif terlibat dalam proses politik, seperti komunikator, aktifis partai, dan aktifis masyarakat.
- d. Pengkritik, yaitu individu yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional dan mungkin di luar norma partisipasi politik konvensional.

Hasil Dan Pembahasan

Perkembangan Teknologi Digital Mempengaruhi Partisipasi Politik Dalam Konteks Demokrasi

Indonesia adalah sebuah negara yang mengutamakan prinsip demokrasi. Partisipasi politik dalam konteks Indonesia mengacu pada keterlibatan warga negara dalam berbagai proses politik. Ini meliputi peran serta mereka dalam menentukan pemimpin, proses pembuatan kebijakan publik, dan pengawasan pemerintahan. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek kunci dalam menjalankan sistem demokrasi yang efektif. Perkembangan partisipasi politik di Indonesia saat ini sangat dinamis, terutama di kalangan warga negara yang berpartisipasi dengan lebih kreatif daripada hanya menjadi subyek dalam proses politik. Saat ini, masyarakat lebih dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik guna mewujudkan kemajuan dalam sistem demokrasi. Konsep partisipasi dalam tata pemerintahan yang baik menjadi pilihan yang penting untuk memastikan kesuksesan pemerintahan yang berorientasi pada rakyat dan menciptakan keadilan sosial (Hamdani et al., 2021).

Menurut Samuel P. Huntington & Nelson (1994), partisipasi merupakan ciri khas dari modernisasi politik, dan tingkat kemajuan demokrasi dapat diukur dari sejauh mana partisipasi politik masyarakat berlangsung. Partisipasi politik adalah bentuk pemberdayaan dan sikap

responsif terhadap aspirasi politik masyarakat secara kolektif. Politik dianggap sebagai fenomena komunikasi, sebuah peristiwa kolektif yang melibatkan interaksi dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan pada cara masyarakat berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia. Akses terhadap informasi politik mengalami peningkatan yang besar, terutama dengan adanya media sosial sebagai platform baru untuk berdiskusi mengenai isu-isu politik. Media sosial menjadi wadah publik bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi berita, dan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.

Peran teknologi digital juga membuka peluang partisipasi politik yang lebih inklusif. Dengan menggunakan platform online, warga dapat berpartisipasi dalam diskusi, menandatangani petisi digital, menggalang dana untuk kampanye politik, dan ikut serta dalam konsultasi publik. Ini memberikan suara kepada individu yang sebelumnya mungkin kurang terlibat aktif dalam politik, dan dengan demikian, meningkatkan representasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Teknologi digital memberikan alat yang efektif bagi masyarakat untuk berbagi pandangan, mengorganisir gerakan politik, dan menyuarakan tuntutan kepada pemimpin politik.

Salah satu segmen yang menjadi fokus kampanye dan sosialisasi di media sosial adalah komunitas. Komunitas memiliki relasi pribadi yang kuat karena berbagi kesamaan minat dan nilai. Strategi kampanye dan sosialisasi berbasis media sosial yang berhasil dapat meyakinkan sebuah komunitas, sehingga dapat mendapatkan dukungan untuk memilih seorang kandidat tertentu. Pada akhirnya, anggota komunitas akan dimobilisasi untuk mendukung kandidat dalam pemilihan tertentu.

Namun, partisipasi politik melalui media sosial memiliki perbedaan signifikan dengan partisipasi melalui media tradisional. Melalui media sosial, individu dapat membangun hubungan yang lebih aktif dan bermakna dengan lembaga-lembaga resmi, sehingga mereka merasa lebih dekat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan bebas. Era digital menimbulkan tantangan bagi kandidat, partai politik, dan para relawan dalam pemilu. Mereka harus mampu beradaptasi dengan era baru ini dan bertransformasi agar dapat menghadapi pengelolaan politik secara digital dengan baik (Pratiknyo, 2022).

Dampak Positif Partisipasi Politik dan Tantangannya Di Era Digital Terhadap Akses Informasi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi politik merupakan hal penting dalam konteks Indonesia. Ada berbagai cara bagi warga negara untuk terlibat dalam bidang politik, termasuk memberikan suara dalam Pemilu atau Pilkada, mengirim pesan ke pemerintah, ikut dalam aksi protes, menjadi anggota partai politik atau organisasi kemasyarakatan, mencalonkan diri untuk jabatan publik, memberikan sumbangan kepada partai atau politisi, dan berpartisipasi dalam acara penggalangan dana (Teorell, J., Torcal & Montero, 2007).

Kemajuan teknologi digital telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks partisipasi politik. Pentingnya partisipasi politik terus diperkuat dengan adanya teknologi digital yang memudahkan akses informasi dan komunikasi antara warga negara. Internet dan media sosial menjadi platform utama dalam menyediakan akses

informasi politik yang lebih cepat dan luas daripada sebelumnya. Warga negara kini dapat dengan mudah mencari berita politik terkini, pandangan ahli, dan data statistik secara real-time, tanpa terbatas oleh waktu dan lokasi. Dengan demikian, teknologi digital telah memperkuat peran warga negara sebagai aktor politik yang terinformasi dan berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Dalam era digital, internet dan media sosial telah berfungsi sebagai public sphere baru bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam diskusi politik. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi, berbagi pandangan, dan menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai isu politik. Diskusi politik tidak lagi terbatas pada ruang fisik tertentu, tetapi telah meluas menjadi dunia maya yang menghubungkan berbagai individu dari berbagai latar belakang dan lokasi. Dengan begitu, partisipasi politik menjadi lebih inklusif dan lebih memungkinkan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Salah satu keuntungan utama dari partisipasi politik melalui teknologi digital adalah kemudahan dalam berbagi informasi. Warga negara dapat dengan cepat menyebarkan berita politik, data, dan pandangan melalui platform media sosial dengan mudah. Ini membuka peluang bagi warga untuk menjadi pembuat opini dan mempengaruhi persepsi publik tentang isu-isu politik. Namun, di sisi lain, tantangan muncul dalam mengelola informasi yang tersebar luas tersebut, karena masyarakat juga harus memilah dan memverifikasi informasi yang mereka terima agar tidak menjadi korban dari penyebaran disinformasi atau hoaks.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital telah memberikan dorongan positif bagi partisipasi politik, namun perlu diingat bahwa partisipasi yang efektif membutuhkan literasi digital yang baik. Penting bagi warga negara untuk mengembangkan pemahaman yang kritis tentang informasi yang mereka temui di dunia maya. Kemampuan untuk memilah berita yang valid dan mengidentifikasi hoaks atau informasi palsu adalah keterampilan yang sangat penting dalam menghadapi kompleksitas informasi di era digital.

Selain itu, partisipasi politik melalui teknologi digital juga berarti bahwa warga harus menjadi lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Dalam suasana yang cepat dan mudahnya penyebaran informasi, warga harus waspada terhadap konsekuensi dari menyebarkan informasi yang belum diverifikasi atau berita palsu yang dapat merugikan orang lain atau menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam meningkatkan literasi digital di kalangan warga negara. Pemerintah dapat memfasilitasi program pelatihan dan pendidikan politik yang melibatkan pemanfaatan teknologi digital secara bijaksana. Di sisi lain, masyarakat sipil dapat mengambil peran sebagai pengawas dan fasilitator dalam menyediakan sumber daya edukatif yang dapat membantu warga negara mengembangkan literasi digital dan kritis.

Dalam kesimpulannya, pentingnya partisipasi politik semakin diperkuat oleh kemajuan teknologi digital. Internet dan media sosial telah memainkan peran sentral dalam menyediakan akses informasi politik yang lebih cepat dan luas. Partisipasi politik melalui teknologi digital membuka peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi politik dan mempengaruhi kebijakan publik. Namun, tantangan juga muncul dalam mengelola informasi yang tersebar luas dan mengembangkan literasi digital yang baik. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam meningkatkan literasi digital di kalangan warga negara menjadi kunci untuk memastikan partisipasi politik yang sehat dan berdampak positif di era digital yang terus berkembang.

Partisipasi politik di era digital juga memberikan dampak positif pada pemberdayaan masyarakat. Teknologi digital memungkinkan individu untuk berbagi pandangan, mengorganisir gerakan politik, dan memobilisasi massa melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hal ini menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif dan menguatkan suara kelompok yang sebelumnya kurang terdengar. Selain itu, partisipasi politik di era digital juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Warga dapat memantau tindakan para pemimpin politik dan memberikan umpan balik secara langsung melalui media sosial, memperkuat kontrol publik terhadap keputusan politik.

Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi terkait partisipasi politik di era digital. Salah satunya adalah penyebaran disinformasi atau berita palsu, yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik dan mempengaruhi keputusan mereka. Disinformasi bisa membingungkan dan merusak kualitas diskusi publik. Manipulasi elektoral juga menjadi masalah serius dalam partisipasi politik di era digital. Pelaku politik dan pihak tertentu bisa menggunakan teknik manipulasi untuk mempengaruhi opini publik, memanipulasi hasil pemilihan, atau menciptakan ketidakpercayaan dalam sistem politik.

Partisipasi politik di era digital membawa dampak positif dan sekaligus tantangan yang harus diatasi dengan bijaksana agar partisipasi politik dapat berlangsung dengan sehat dan inklusif. Salah satu tantangan utama adalah adanya polarisasi opini politik yang semakin meningkat di platform media sosial. Algoritma media sosial yang menyesuaikan konten dengan preferensi individu dapat menciptakan apa yang disebut "filter bubble," di mana warga hanya terpapar dengan sudut pandang yang sejalan dengan kepercayaan mereka sendiri. Hal ini dapat memperkuat polarisasi dan membatasi pemahaman holistik serta seimbang tentang isu-isu politik.

Demokrasi digital menimbulkan tantangan baru bagi negara dan pemerintahan untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan politik yang berkembang dengan pesat. Dengan partisipasi politik yang lebih aktif di era digital, kecepatan dan luasnya peredaran informasi memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah terlibat dalam proses politik. Namun, di balik potensi positif ini, ada potensi risiko seperti penyebaran disinformasi dan manipulasi elektoral yang dapat merusak integritas dan kualitas diskusi publik.

Kesadaran literasi digital dan kritis menjadi kunci untuk mengatasi tantangan disinformasi dan polarisasi opini politik di era digital. Warga harus dilatih untuk mengembangkan pemahaman yang kritis terhadap informasi politik yang mereka temui di platform digital. Kemampuan untuk memilah informasi yang valid dari hoaks dan berbagai bentuk disinformasi lainnya adalah penting agar partisipasi politik dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, upaya kolaboratif dari berbagai pihak juga penting dalam menghadapi tantangan partisipasi politik di era digital. Pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan partisipasi politik yang aman, sehat, dan konstruktif di dunia digital. Pemerintah perlu mengambil peran sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, sementara platform media sosial bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi pengguna. Di sisi lain, masyarakat sipil memiliki peran sebagai pengawas independen dan pendukung partisipasi politik yang berkelanjutan.

Kolaborasi yang efektif antara ketiga pihak ini akan menciptakan ekosistem partisipasi politik yang sehat dan berdaya guna di era digital yang terus berkembang. Dengan menghadapi

tantangan polarisasi opini dan disinformasi, serta meningkatkan literasi digital dan kritis di kalangan warga, partisipasi politik dapat berlangsung dengan lebih inklusif dan berdampak positif. Semua pihak harus berperan aktif dalam memastikan bahwa partisipasi politik di era digital berjalan dengan baik demi keberlangsungan demokrasi yang kuat dan berdaya tahan.

Strategi Pemerintah, Platform Digital, Dan Masyarakat Sipil Dalam Mengatasi Tantangan Dan Memanfaatkan Peluang Partisipasi Politik Di Era Digital

Peran pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil memiliki signifikansi penting dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang partisipasi politik di era digital. Dalam konteks yang semakin terhubung secara digital, kolaborasi antara tiga pihak ini dapat memperkuat demokrasi dan memastikan partisipasi politik yang inklusif, transparan, dan aman.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung partisipasi politik yang sehat dan adil di era digital. Mereka dapat mengadopsi kerangka regulasi yang membatasi penyebaran disinformasi, manipulasi elektoral, dan aktivitas ilegal lainnya di dunia digital. Dalam hal ini, pemerintah dapat memperkuat lembaga pengawas yang memantau dan menindak pelanggaran terkait partisipasi politik di platform digital. Selain itu, pemerintah juga dapat mempromosikan literasi digital dan pendidikan politik yang melibatkan semua warga, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang kritis terhadap informasi politik dan teknologi digital. Pemerintah juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas platform digital, serta memfasilitasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu terkait partisipasi politik di era digital.

Platform digital, seperti media sosial, platform berbagi informasi, dan alat komunikasi lainnya, memiliki peran sentral dalam memfasilitasi partisipasi politik di era digital. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, transparan, dan inklusif bagi pengguna mereka. Platform-platform tersebut dapat mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme pemantauan yang ketat untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar, termasuk disinformasi dan manipulasi elektoral. Upaya untuk meningkatkan transparansi algoritma dan mengurangi efek filter bubble juga perlu dilakukan untuk mempromosikan keragaman opini politik. Platform-platform digital juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan literasi digital dan menyediakan sumber daya edukatif mengenai partisipasi politik yang sehat dan aman.

Masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai pengawas independen dan pendukung partisipasi politik yang berkelanjutan di era digital. Organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan lembaga swadaya masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menyuarakan kepentingan masyarakat, mengadvokasi kebijakan yang mendukung partisipasi politik yang inklusif, dan mengawasi pelaksanaan aturan yang ada. Masyarakat sipil juga dapat memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada warga, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang kritis tentang informasi politik dan teknologi digital. Selain itu, masyarakat sipil dapat memobilisasi gerakan-gerakan dan kampanye yang mempromosikan partisipasi politik yang berkelanjutan dan mendorong transparansi serta akuntabilitas platform digital. Dalam keseluruhan, peran pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang partisipasi politik di era digital. Dengan kolaborasi yang efektif antara ketiga pihak ini, dapat

terwujud partisipasi politik yang inklusif, transparan, dan aman di era digital yang terus berkembang.

Kesimpulan

Kehadiran media sosial telah mempermudah proses partisipasi politik warga negara. Cukup dengan duduk di balik layar, seorang warga negara bisa turut dalam proses kampanye, sosialisasi, penggalangan dana, protes sosial, dan partisipasi politik lainnya. Dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, partisipasi politik di era digital mendorong pemimpin politik untuk bertanggung jawab dan memperkuat kontrol publik dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi politik menggunakan media sosial juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan media konvensional. Mereka yang bisa menyinergikan media partisipasi konvensional dan digital (media sosial) akan menuai hasil yang optimal. Dengan sinergi antar keduanya, demokrasi juga akan lebih kuat.

Peran pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil sangat krusial dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang partisipasi politik di era digital. Kolaborasi antara ketiga pihak ini berperan penting dalam memperkuat demokrasi dan memastikan partisipasi politik yang inklusif, transparan, dan aman di dunia digital yang semakin terhubung. Pemerintah diharapkan menciptakan kebijakan yang mendukung partisipasi politik yang sehat dan adil, serta mengawasi pelaksanaan aturan di platform digital. Platform digital bertanggung jawab menciptakan lingkungan aman dan transparan, sementara masyarakat sipil berperan sebagai pengawas independen dan pendukung partisipasi politik yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi efektif di antara ketiga pihak ini, dapat tercapai partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan di era digital yang terus berkembang.

Referensi

- Alexander, C. J., & Pal, L. A. (1998). *Digital Democracy: Policy and Politics in the Wired World*. Oxford University Press.
- Becker, T. (1998). Governance and electronic innovation: A clash of paradigms. *Information, Communication and Society*, 1(3), 339–345.
- Berger, P. L. (1976). *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change*. Anchor Books.
- Castells, M. (1997). *The Rise of the Network Society, volume 2: The Power of Identity*. Oxford: Blackwell.
- Dahl, R. A. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Rajawali Press.
- Eko Endarmoko. (2006). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gelgel, N. M. R. A. (2019). “Trending Topic” dan Hilangnya Ruang Publik yang Sehat. In Wicaksono (Ed.), *Demokrasi Damai Era Digital* (Cetakan 1). Siberkreasi.
- Hacker, K. L., & Dijk, I. (2000). *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice*. Sage.
- Hague, B. N., & Loader, B. (1999). *Digital democracy: Discourse and decision making in the information age*. Routledge.
- Hamdani, R., Herdiansyah, A. G., & Bintari, A. (2021). Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasustentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Aspirasi*, 11(2), 1–19.

- Irawan, P. (2007). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. DIA Fisip UI.
- Kemp, S. (2021). *Digital 2020: Indonesia - DataReportal – Global Digital Insights*. Datareportal.Com. <https://datareportal.com/reports/digital2021-indonesia%0A>
- Kominfo. (2019). *Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital*. Online.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pratiknyo, A. D. (2022). Partisipasi Masyarakat Digital Sebagai Tantangan Baru Untuk Pemilu Indonesia. *JDIH*.
- Rahman, H. . (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu.
- Samuel P. Huntington, & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta.
- Santosa, T. E. (2015). *Raising Children In Digital Era – Pola Asuh Efektif untuk Anak di Era Digital*. PT Gramedia.
- Schmidt, E., & Cohen, J. (2014). *The New Digital Age: Cakrawala Baru Negara, Bisnis, dan Hidup Kita*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Sudijono Sastroatmodjo. (1995). *Partisipasi Politik*. IKIP Semarang Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Teorell, J., Torcal, M., & Montero, J. R. (2007). *Political Participation: Mapping the Terrain*. Routledge.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media Group.